

IDENTITAS DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM

Arie Yanto, Wahyudin Arif

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

pusjianmari@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.125>

Abstrak

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghadirkan laut sebagai jembatan penghubung, bukan jembatan pemisah. Pengelolaan laut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan Indonesia. Pentingnya pembangunan maritim Indonesia, yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap definisi kebijakan terkait masalah maritim, juga mengembangkan kesadaran kita sebagai masyarakat tentang kekayaan laut dan kehebatan maritim Indonesia. Dengan cakupan yang begitu luas dan menyeluruh, Laut Indonesia pada hakekatnya mengandung potensi keanekaragaman laut, baik hayati maupun non hayati. Oleh karena itu, sektor maritim harus dimanfaatkan untuk menopang perekonomian negara ini. Pelayaran memiliki potensi untuk berkembang sebagai pilar perekonomian nasional. Dan tentunya sektor kelautan tidak hanya menghasilkan produk perikanan. Pemahaman maritim ibarat semangat membangun bangsa maritim. Oleh karena itu, sektor pendidikan kemaritiman harus dipersiapkan dan menjadi andalan kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Perkembangan negara kelautan yang sebenarnya harus diwujudkan sejak usia dini dan dimasukkan dalam kurikulum dari sekolah dasar (SD) karena memang terasa agak "sedikit aneh" ketika negara yang memproklamirkan diri adalah sebuah negara Kelautan atau Nusantara, tetapi orangnya (sumber daya manusia) tidak memiliki pelatihan kelautan.

Kata Kunci : Maritim, Pendidikan, Identitas

Abstract

The territory of Indonesia is an archipelagic country that presents the sea as a connecting bridge, not a dividing bridge. Marine management is very important for the people living in the Indonesian archipelago. The importance of Indonesia's maritime development, which will later contribute to the definition of policies related to maritime issues, also develops our awareness as a society about Indonesia's marine wealth and maritime prowess. With such a broad and comprehensive coverage, the Indonesian Sea essentially contains the potential for marine diversity, both biological nor non-living. Therefore, the maritime sector must be utilized to support the country's economy. Shipping has the potential to develop as a pillar of the national economy. And of course the maritime sector does not only produce fishery products. Maritime understanding is like the spirit of building a maritime nation. Therefore, the maritime education sector must be prepared and become the mainstay of Indonesia's national education policy. The true development of a maritime nation must be realized from an early age and included in the curriculum from elementary school (SD) because it does feel a bit "weird" when the self-proclaimed country is a maritime country or archipelago, but the people (human resources) do not have training. marine.

Keywords: Maritime, Education, Identity

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulau-pulunya dipisahkan oleh lautan. Meski dipisahkan oleh lautan luas, setiap suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia membentuk satu kesatuan. Selain itu, adanya konsep wawasan nusantara menjadikan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara. Hal ini diperkuat dengan budaya bahari yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu.

Sejarah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan nusantara bahkan mampu mengarungi lautan luas hingga pesisir pantai Madagaskar di Afrika Selatan. Akan tetapi, setelah mencapai kejayaan budaya maritim, Indonesia terus mengalami kemunduran, terutama setelah VOC dan pemerintahan kolonial Belanda datang ke Indonesia. Perjanjian Giyanti¹ tahun 1755 antara Belanda dengan raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua raja tersebut harus menyerahkan perdagangan di wilayahnya kepada Belanda. Sejak saat itu, jiwa - jiwa bahari bangsa Indonesia mengalami penurunan dan nilai-nilai budaya berubah dari budaya bahari menjadi budaya kontinental.

Sejarah maritim yang penting ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki

keunggulan dibandingkan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara dengan aspek budaya maritim yang sudah ada jauh sebelum konsep Indonesia lahir.

Potensi itu belum bisa dimaksimalkan oleh Indonesia, hal ini disebabkan paradigma pembangunan yang mengutamakan masyarakat perkotaan dan pertanian internal sedemikian rupa sehingga kurang memperhatikan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan masih sangat tidak proporsional dibandingkan dengan aspek lain seperti pertanian, industri, komunikasi politik, dan lain lain.

Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghadirkan laut sebagai jembatan penghubung, bukan jembatan pemisah. Oleh karena itu, pengelolaan laut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan Indonesia. Kondisi seperti itu menjadikan mereka adalah orang-orang yang mengenal kehidupan laut. Selain itu, letak kepulauan Indonesia sangat strategis dalam konteks perdagangan maritim internasional antara dunia Barat dan Timur, sehingga dalam artikel ini kami mencoba memberikan gambaran tentang pentingnya pembangunan maritim Indonesia, yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap definisi kebijakan terkait masalah

¹ "Perjanjian Giyanti", Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/perjanjian-giyanti>, diakses 3 February 2023

maritim, dan juga untuk mengembangkan kesadaran kita sebagai masyarakat tentang kekayaan laut dan kehebatan maritim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan literasi dari buku-buku tentang analisis, jurnal-jurnal terkait, dan media online lainnya.

PEMBAHASAN

A. Laut Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang lautnya memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak dahulu kala nenek moyang bangsa Indonesia mengarungi lautan, berlayar dan berdagang dari satu tempat ke tempat lain, menjelajahi nusantara bahkan sampai ke luar negeri.

Sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor kelautan dan maritim memiliki kepentingan strategis yang tinggi bagi Indonesia dari segi ekonomi dan ekologi, sosial budaya, hukum dan keamanan. Namun, sejauh ini perhatian yang diberikan terhadap area ini relatif lebih sedikit dengan sektor kontinental.

Dengan cakupan yang begitu luas dan menyeluruh, Laut Indonesia pada hakekatnya mengandung potensi keanekaragaman laut, baik hayati maupun nonhayati. Oleh karena itu, sektor maritim harus dimanfaatkan untuk menopang perekonomian negara ini. Pelayaran memiliki potensi untuk berkembang sebagai pilar perekonomian nasional. Dan tentunya sektor kelautan tidak hanya menghasilkan produk perikanan.

B. Identitas Indonesia sebagai negara maritim

Status geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempengaruhi karakteristik masyarakat Indonesia, dimana dalam sejarah bangsa Indonesia hidup orang-orang dari berbagai belahan dunia, menjadikan karakteristik Indonesia sangat beragam menurut suku, bangsa dan budaya. Jadi jati diri bangsa yang benar untuk negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

Salah satu identitas bangsa yang harus dihormati adalah kesadaran berwawasan nusantara, dimana laut sebagai alat pemersatu bangsa bukan sebagai faktor pemecah belah, dan NKRI sebagai harga mati.

Identitas negara kepulauan menjadikan pulau-pulau atau gugusan pulau

pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti Batam, Bangka, Gunung Sitoli, Ambon, Ternate, Morotai, Biak, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan lain-lain. Pulau-pulau sekitarnya menjadi feri atau pangkalan yang menawarkan produk perikanan, biomedis, dan layanan kelautan lainnya. Pusat-pusat pertumbuhan ini menjadi sahabat industri dan bahan baku pulau-pulau sekitarnya. Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SKPT) dikembangkan sebagai landasan lintas sektor bagi industri perikanan dan industri lainnya yang dilengkapi dengan CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine and Security*) untuk ekspor langsung ke luar negeri.

Karakter yang dapat menggambarkan identitas Indonesia sebagai negara maritim terlihat melalui pola budaya dan kearifan lokal pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Keanekaragaman ini mencakup konsep dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam pertanyaan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Jati diri sebagai bangsa maritim dapat ditunjukkan dengan sifat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang lebih egaliter, terbuka, mau menerima hal/budaya baru serta siap menanggung resiko dan tantangan. Sejarah telah menunjukkan

bahwa pelaut Indonesia adalah pelaut handal/terampil dan mendominasi perdagangan nusantara.

Indonesia mendominasi lalu lintas maritim antar pulau, khususnya lalu lintas maritim domestik yang saat ini masih banyak dikuasai asing. Industri maritim semakin berkembang. Indonesia juga secara langsung menguasai dan mengelola sumber daya alam laut dan jasa kelautan, mengolahnya dan menghasilkan nilai tambah untuk ekspor. Dalam jasa kemaritiman, nilai tambah pariwisata bahari harus ditingkatkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan menciptakan devisa negara. Indonesia adalah penghasil tuna terbesar, penghasil ganggang terbesar dan terumbu karang terbesar. Melainkan sebagai penghasil bahan mentah. Bagaimana hal ini dapat diubah oleh industri pengolahan, agar nilai tambah hasil laut lebih tinggi dan menggantikan kebutuhan pangan dan energi rumah tangga. Energi gelombang laut diubah menjadi listrik untuk mengatasi defisit energi serta defisit neraca perdagangan dan mata uang.

C. Masyarakat dan Negara

Unsur-unsur yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kelautan adalah: Negara (elemen vertikal) dan masyarakat sipil (elemen horizontal). Kedua unsur tersebut merupakan inti dan tulang punggung untuk mewujudkan

pembangunan bangsa maritim. Kedua elemen ini memainkan peran penting dan bekerja dalam strategi pengembangan operasional di bawah payung luas visi maritim.

Studi tentang perkembangan dan kemajuan industri maritim hanya akan menjadi tumpukan sampah dokumenter jika visi maritim Indonesia tidak diterjemahkan ke dalam visi misi jangka panjang. Pemahaman maritim ibarat semangat membangun bangsa maritim saja. Oleh karena itu, sektor pendidikan kemaritiman harus dipersiapkan dan menjadi andalan kebijakan pendidikan nasional Indonesia.

Selain pengetahuan maritim, harus ada hubungan kerja untuk visi ini. Jika Visi maritim Indonesia sebagai ruh (spirit) pembangunan bangsa maritim, kebijakan menjadi kerangka dan urat nadi pembangunan maritim. Kebijakan tersebut mengatur strategi operasional intelijen maritim Indonesia. Sebagai produsen, negara berperan penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan maritim dan sanksi maritim.

Masyarakat sipil adalah tulang punggung pembangunan maritim. Kekuatan inovatif dan orientasi pembangunan masyarakat madani sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan dan Otoritas Maritim Indonesia. Masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai bidang kehidupan

sosial yang diatur dan dicirikan oleh: Kesukarelaan, kontribusi pribadi dan pelestarian diri, kemandirian tingkat tinggi dalam berurusan dengan negara dan komitmen terhadap norma atau nilai hukum yang dianut oleh warga negara.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang selalu berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kemandirian dan kemandirian berlandaskan pemahaman kemaritiman. Kegiatan masyarakat sipil tidak dapat dilakukan tanpa insentif pemerintah melalui kebijakan pembangunan, perlindungan dan pengembangan sektor maritim Indonesia. Masyarakat sipil meliputi ilmuwan, nelayan dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu populasi terbesar di dunia, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk membangun masyarakat sipil yang kuat.

Ketika berbicara tentang masyarakat sipil, kita harus berbicara tentang negara. Artinya, pembahasan masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari negara. Keduanya seperti bagian tubuh yang berbeda, namun bersinergi. Meskipun masyarakat sipil dan negara memiliki batasannya sendiri. Namun diantara keduanya tidak perlu menggunakan persaingan sebagai lawan untuk memperjuangkan kepentingan atau tujuannya. Masyarakat sipil dan negara harus bersinergi untuk membangun negara Indonesia.

Dan salah satu upaya terpenting yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya laut adalah bekerja sama dengan aparat keamanan termasuk TNI Angkatan Laut yang harus mampu mencegah pencurian ikan oleh pihak asing atau penjualan ikan oleh nelayan sendiri, tetapi tidak melalui mekanisme apapun yang dirancang oleh pemerintah yang mengakibatkan merugikan negara.

Salah satu upaya pemerintah adalah menambah anggaran TNI AL agar memiliki dana untuk membeli kapal patroli guna menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan jahil.

Ke depan, pelayaran Indonesia siap menjadi arus utama pembangunan nasional dengan memanfaatkan secara lestari ekosistem laut dan segala kekayaan yang dikandungnya untuk persatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Bisakah Indonesia kembali menjadi negara maritim? Bentuk bumi berupa Kepulauan Indonesia, yang menarik orang untuk pergi ke laut, dan populasi penduduk yang sangat besar. Melihat potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi negara maritim yang penting di kancah dunia. Wilayah maritim dan sumber daya manusia Indonesia menempati urutan pertama di kawasan ASEAN. Potensi ini ada, namun seperti

harta karun, harta atau potensi ini harus digali melalui dorongan semangat pemahaman bahari. Institusi pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong orang untuk berkuasa di laut. Sinergi antara masyarakat sipil dan negara untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sebagai negara maritim.

PENUTUP

“Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau”

(A.B Iapian)

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali

Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga

Bangsa pelaut armada militer

Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi

Irama gelombang lautan itu sendiri”

(Ir. Soekarno, 1953)

Realitas maritim Indonesia mengajak bahkan memaksa kita untuk segera berbenah, Memulihkan riwayat yang dihapus. Perspektif maritim dalam hal ini pada masyarakat sipil, dan negara merupakan bagian penting dari pembangunan negara maritim.

Masyarakat sipil merupakan tulang punggung pembangunan maritim. Namun,

seperti mata rantai yang terputus. Untuk menghubungkan kedua elemen tersebut, diperlukan "link" (titik temu) antara negara dan masyarakat sipil.

Perkembangan negara kelautan yang sebenarnya harus diwujudkan sejak usia dini dan dimasukkan dalam kurikulum dari sekolah dasar (SD) karena memang terasa agak "sedikit aneh" ketika negara yang memproklamirkan diri adalah sebuah negara Kelautan atau Nusantara, tetapi orangnya (sumber daya manusia) tidak memiliki pelatihan kelautan.

Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Mengaktifkan kesadaran bahari sejak usia dini sangat penting mulai sekarang, sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sipil, ia menjadi elemen penting bagi kita semua, hingga anak cucu kita, memahami betapa besar dan megahnya sejarah bahwa negara kita dulu adalah Negara Maritim Indonesia sekarang dan selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/pesisirpulaukecil/faq/budaya-ma.html>, diakses 2 February 2023

Sondakh, B. K., 2010. Sejarah Maritim Indonesia: Meretas Sejarah Menegakkan Martabat Indonesia, Institute for Maritim Studies.

<http://indomaritimstitute.org/wpcontent/uploads/2010/10/Sejarah-Maritim-Indonesia.pdf> di akses pada tanggal 3 February 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/GarisPantailndonesia>.di akses pada tanggal 3 Januari 2017

Anonim. 2014. Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap. <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:Masih.Tertidur.Lelap>. di akses pada tanggal 4 Desember 2023

Tridoyo Kusumastanto. 2012. Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI.<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20%20tridoyo%20kusumastanto.pdf>. di akses pada tanggal 8 Desember

"Perjanjian Giyanti", Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/perjanjian-giyanti>, diakses 3 February 2023